

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat *output* yang dihasilkan untuk setiap *input* yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 2008).

Abdullah *et al.*, (2002) menyatakan daya saing ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik. Daya saing daerah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada aras mikro perusahaan. Hal ini mendefenisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan suatu perekonomian” dari pada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi bukan hanya perusahaan tetapi meliputi rumah tangga, pemerintah, dan agen-agen ekonomi lainnya. Tujuan akhir dari peningkatan wilayah atau daya saing perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut (Abdullah *et al.*, 2003).

Dinamika perkembangan ekonomi global terutama di era revolusi industri ke-4 memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing secara menyeluruh, yang sekarang ini dihadapkan pada perdagangan bebas, diantaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar-kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi peluang karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI).

Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Dalam laporan indeks daya saing global edisi 2017-2018, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2017 berada pada posisi 36, naik 5 peringkat dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi 41. Meski naik ke posisi 36, peringkat daya saing Indonesia masih di bawah 3 negara tetangga di ASEAN yaitu Thailand yang berada di posisi 32, Malaysia di posisi 23, dan Singapura di posisi 3. Namun, Indonesia masih berada di atas Vietnam yang berada di posisi 55 dan Filipina di posisi 56 serta Brunei Darussalam di posisi 46. ([World Economic Forum, 2018](#)).

Tabel 1.1 menunjukkan pada level provinsi, Kepulauan Riau yang menduduki posisi ketujuh secara nasional, adalah satu-satunya provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar provinsi dengan daya saing tertinggi. Sedangkan Provinsi Jambi berada pada posisi ke-14 secara nasional, dan menempati urutan kedua di Pulau Sumatera, namun hanya mampu masuk dalam kategori 13 provinsi daya saing menengah. Selain Jambi, Provinsi Sumatera Utara (ke-15), Riau (16), Sumatera Utara (ke-19), Bangka Belitung (ke-20), dan Bengkulu (23) masuk dalam 13 provinsi menengah. Sementara itu, Provinsi Lampung (ke-25), dan Kepulauan Bangka Belitung (ke-30) juga masuk dalam kategori ini.

Tabel 1.1. Peringkat Daya Saing Daerah Provinsi di Pulau Sumatera

No.	Provinsi	Ranking Daya Saing Daerah		
		2013	2014	2015
1	Kepulauan Riau	8	11	7
2	Jambi	25	27	14
3	Sumatera Utara	19	19	15
4	Riau	10	9	16
5	Sumatera Selatan	12	16	17
6	Sumatera Barat	17	17	22
7	Bengkulu	27	30	23
8	Nanggroe Aceh Darussalam	16	13	24
9	Lampung	20	24	25
10	Kepulauan Bangka Belitung	29	20	30

Sumber: Asia Competitiveness Institute (diperoleh dari berbagai edisi)

Peringkat-peringkat yang relatif rendah ini berkontribusi atas posisi Wilayah Sumatera secara keseluruhan yang menempati peringkat keempat. Artinya, strategi yang terencana dengan baik dan menyeluruh yang menggabungkan potensi semua provinsi akan meningkatkan skor daya saing untuk Wilayah Sumatera.

Demi meningkatkan daya saing, pemerintah pusat terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan hal ini jugalah yang mendasari terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan dalam menghadapi globalisasi yang semakin meluas dengan cepat yang didorong oleh perubahan perkembangan teknologi. Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jambi mengambil inisiatif untuk melakukan pemetaan daya saing daerah di dalam wilayah administrasinya. Dengan melakukan pemetaan daya saing, selanjutnya dapat dirumuskan strategi agar Provinsi Jambi mampu berkontribusi besar dalam peningkatan daya saing nasional.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari kajian penyusunan dokumen pemetaan daya saing ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 adalah untuk menganalisis pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan

Adapun tujuan penelitian, adalah: (1) Mengetahui tingkat daya saing daerah Provinsi Jambi, (2) Menganalisis potensi daya saing daerah Provinsi Jambi, dan (3) Menyusun strategi meningkatkan daya saing daerah Provinsi Jambi.

Mengacu pada tujuan kegiatan, maka sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam kegiatan penyusunan kajian peningkatan daya saing Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: (1) Teridentifikasi daya saing ekonomi Provinsi Jambi, dan (2) tersusunnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing daerah Provinsi Jambi

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup lokasi kegiatan penyusunan dokumen pemetaan daya saing ekonomi Provinsi Jambi adalah wilayah Administrasi Daerah Provinsi Jambi. Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen daya saing ekonomi meliputi: (1) Identifikasi sektoral yang akan dikembangkan dan kebijakan rencana program unggulan, (2) identifikasi Potensi dan Daya Saing Daerah terdiri dari kondisi ekonomi Provinsi Jambi, potensi Provinsi Jambi, potensi sektor pertanian, potensi sektor industri, dan potensi sektor pariwisata, (3) identifikasi potensi sektoral, (4) hasil analisis Tipologi Klassen, (5) hasil analisis LQ, (6) hasil analisis *Shift-Share*, (7) identifikasi daya saing daerah, dan (8) perumusan strategi kebijakan peningkatan daya saing daerah.

1.4 KELUARAN

Pertama, keluaran daya saing daerah menurut indikator input meliputi: (1) Indikator Input Daya Saing Lingkungan Usaha Produktif. Indikator yang umumnya dipakai untuk menunjukkan lingkungan usaha produktif adalah persentase penduduk berdasarkan pendidikan, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, serta jumlah masyarakat yang berlangganan listrik. (2) Perekonomian daerah menunjukkan potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah perekonomian daerah meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, laju inflasi, realisasi investasi daerah, serta *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yakni ukuran yang menyatakan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit pengeluaran. (3) Ketenagakerjaan memiliki peran yang

penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan daya saing daerah. (4) Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menciptakan iklim ekonomi yang dinamis. (5) Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. (6) PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.

Kedua, keluaran daya saing daerah menurut indikator output meliputi: (1) Daya saing produktivitas tenaga kerja produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. (2) Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. (3) PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.

Ketiga, perumusan Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui keterkaitan antara faktor internal dan eksternal pembentuk daya saing daerah

1.5 PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan penyusunan dokumen pemetaan daya saing ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- (1) **Laporan pendahuluan**, yang berisi penjelasan rinci antara lain:
 - (a) Perumusan masalah secara umum dan pembuatan alur pikir Penyusunan Dokumen Pemetaan Daya Saing Ekonomi Provinsi Jambi.
 - (b) Perencanaan persiapan survey dan penyiapan formulir pendataan dan produk yang diperlukan, penentuan sumber data, daftar kebutuhan data yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, alat pengukuran data indikator pencapaian target data yang diperlukan, personil yang melakukan pendataan dan metode pelaksanaan pengumpulan data.

- (c) Perumusan rencana kerja pekerjaan dan pencapaian sasaran, penetapan metode dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka pencapaian sasaran, jadwal, waktu, tenaga teknis/ahli yang terlibat, dsb.
- (2) **Laporan Antara**, Laporan Antara diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 4 (empat) buku dan dilakukan diskusi pembahasan bersama Tim Supervisi di Daerah.
- (3) **Laporan Akhir**, harus diserahkan paling lambat 60 (Enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 4 (Dok) buku. Laporan akhir ini merupakan hasil akhir rumusan/kesepakatan sektoral dan daerah serta merupakan penyempurnaan dari Laporan Draft Akhir.
- (4) **Soft Copy Laporan**, Cakram padat (Compact Disc) merupakan laporan secara keseluruhan dalam bentuk CD. CD harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) CD.